
Peran Gerakan Perempuan dalam Reintegrasi Perempuan Eks-Kombatan Pasca Konflik: Studi Atas Liga Inong Aceh (LINA)

Anna Christi Suwardi

Program Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada

Kampus Bulaksumur Yogyakarta 55281

Email: annacsuwardi@gmail.com

Diterima pada 4 Januari 2015, Disetujui pada 11 Maret 2015

Abstract

After signing Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki at August 15, 2005 between Government of Indonesia (GoI) and Free Aceh Movement / *Gerakan Aceh Merdeka* (GAM), are facilitated by Crisis Management Initiative (CMI) lead by Finland former president Martti Ahtisaari. As post conflict area, Aceh entering three phases of peacebuilding processes called Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR). Those the reintegration is the most challenging phase due to complexity and long term process. Regarding the importantly of reintegration process, unfortunately MoU did not put the gender base sensitivity as the part of decision making on peace agreement. Here is the reintegration program policies began with gender injustice against female ex-combatant who did not mentioned as a beneficiaries of reintegration program benefits. Those reality of gender injustice reintegration program had been initiated the establishment of Acehnese Women League/*Liga Inong Aceh* (LINA) on June 11, 2006 by Shadia Marhaban and some Acehnese women activists.

Key words: LINA, reintegration, female ex-combatant

Abstrak

Pasca penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005 antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang mengakhiri tiga dekade konflik berdarah di Aceh. Fase baru kehidupan Aceh sebagai wilayah pasca konflik dalam rangkaian proses bina-damai (*peacebuilding*) melewati tiga mekanisme, yakni *Disarmament*, *Demobilization* dan *Reintegration* (DDR). Dari ketiga aspek tersebut, proses reintegrasi menjadi tahapan yang paling menantang dan membutuhkan komitmen kuat semua pihak. Sangat disayangkan, pengejawantahan tentang proses reintegrasi yang tercantum dalam MoU Helsinki masih belum ramah gender, terlihat dalam poin 3.2.5 baru menyebutkan penerima manfaat program reintegrasi adalah mantan GAM saja. Sementara, realitanya terdapatlah perempuan eks-kombatan yang dijuluki pasukan Inong Bale sebagai satu kesatuan dengan GAM pada masa konflik. Hak-hak mereka tidak diakomodasi dalam MoU. Realita ketidakadilan program perdamaian terhadap perempuan eks-kombatan inilah yang menginisiasi lahirnya Liga Inong Aceh (LINA) pada tanggal 11 Juni 2006 yang diinisiasi oleh Shadia Marhaban dan beberapa aktivis-aktivis perempuan Aceh.

Kata kunci: LINA, reintegrasi, perempuan eks-kombatan

PENDAHULUAN

LINA pada awalnya merupakan gerakan perempuan yang berbasis kelompok pro referendum dan para Inong Bale, yakni para wanita terdiri dari janda GAM dan perempuan-perempuan lain yang turut menjadi korban atas konflik di Aceh. Pada masa konflik, pasukan Inong Bale disebut-sebut sebagai kekuatan

sayap kanan GAM, mereka ikut terjun berperang melawan militer, menjadi mata-mata maupun membantu urusan logistik. Kiprah Inong Bale selama perang Aceh ini membuat mereka sering dijuluki sebagai *Widow Warrior*.

Dalam konteks konflik di Aceh, kaum Inong Bale

menjadi suatu kelompok khusus dengan berbagai kisah yang dimilikinya. Yang membuat Inong Bale berbeda dengan kaum perempuan lainnya di nusantara adalah ketika mereka mampu hadir sebagai kekuatan emergensi meskipun mereka pula yang mengalami efek konflik paling tajam. Mereka sebagai korban konflik dan sekaligus menjadi bagian dalam kelompok atau pihak yang berkonflik.

Adapun sisi menarik dari LINA sendiri adalah LINA sebagai sebuah wadah atau perpanjangan tangan dari Inong Bale (perempuan eks-kombatan) setelah konflik berakhir. Perempuan eks-kombatan masih yang justru terlupakan pada masa perdamaian kemudian menjadi merasakan mendapatkan tempat atau kendaraan untuk tetap menjalankan eksistensinya. Dapat dikatakan bahwa LINA beridentitas sebagai wajah baru perempuan eks-kombatan pada masa damai dan berfokus pada pendidikan politik sebagai pengganti senjata mereka. Dari sudut pandang inilah yang membedakan LINA dengan gerakan perempuan lain di Indonesia.

LINA menilai persoalan sosial seperti ketimpangan, diskriminasi, dan kekerasan struktural terhadap kaum perempuan menjadi suatu kondisi problematis yang harus segera dibenahi. LINA juga beranggapan bahwa kaum perempuan masih termarginalkan dari reintegrasi pasca konflik. Oleh karena itu, LINA menjadi wujud representatif perjuangan hak perempuan dalam membangun perdamaian yang adil di Aceh.

Pada tatanan yang lebih spesifik, penelitian ini membahas seputar peran LINA dalam memperjuangkan hak-hak perempuan eks-kombatan pada proses reintegrasi pasca konflik di Aceh dengan memosisikan LINA sebagai suatu bentuk gerakan sosial yang fokus terhadap kaum perempuan. Mengetahui seperti apa pola bangunan ikatan solidaritas dalam gerakannya, lalu mendiskusikan tentang mobilisasi sumber daya yang dilakukan LINA untuk melaksanakan program kerjanya. Realita kehidupan perempuan eks-kombatan pasca konflik, menunjukkan bahwa mereka menjadi kelompok yang memerlukan fasilitator sekaligus mobilisator supaya hak-hak mereka bisa diperoleh dengan adil.

METODOLOGI

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif, karena berangkat dari rasa ketertarikan penulis terhadap objek yang diamati. Dengan memakai metode studi kasus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pemaparan yang mendalam terhadap kasus yang diangkat. Metode ini menantang penulis untuk melakukan penelitian yang komprehensif, detail, dan mendalam.

Penulis menggunakan data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan diperkuat dengan pengamatan terjun langsung ke lapangan. Berbagai media bacaan baik buku, majalah, dan surat kabar serta banyaknya media *online* baik jurnal, situs, maupun laporan hasil riset yang terkait dengan topik seperti: gerakan perempuan Aceh, proses DDR, perkembangan politik lokal Aceh pasca konflik, sejarah perempuan Inong Bale, dan bina-damai menjadi sumber data yang dikaji dalam penelitian ini. Penulis juga menambah sumber materi riset dari beberapa kumpulan hasil wawancara langsung dengan narasumber, seperti presiden LINA dan beberapa kader serta aktivisnya; perempuan eks-Inong Bale; ketua BP2A, aktivis perempuan Aceh di luar LINA, dan beberapa pengamat politik Aceh lainnya.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Riset ini menggunakan konsep reintegrasi untuk memahami esensi tahap reintegrasi itu sendiri sebagai suatu proses yang dijalani eks-kombatan pada masa pasca konflik untuk menjawab pertanyaan tentang peran LINA dalam proses reintegrasi perempuan eks-kombatan. Definisi sekaligus tujuan yang terkandung dalam konsep reintegrasi tersebut akan digunakan untuk menelaah seluruh kegiatan dan program kerja LINA terhadap para perempuan eks-kombatan. Artinya bahwa, sejauh mana kesesuaian makna dan manfaat program kerja LINA dengan apa yang dikandung oleh reintegrasi itu sendiri. Istilah reintegrasi pertama kali digunakan oleh PBB dalam resolusi Dewan Keamanan Nomor 650 tentang misi

perdamaian pada 27 Maret 1990. Reintegrasi menurut PBB diartikan sebagai “*the process by which ex-combatants acquire civilian status and gain sustainable employment and income*”. Maka hal terpenting dalam proses reintegrasi ialah ketika proses ini mampu menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Para penstudi perdamaian memaknai reintegrasi dalam beberapa argumen, seperti yang diutarakan oleh Nilsson (2005), Mughah (2009), dan Ball & Goor (2009). Reintegrasi menjadi suatu hal yang sangat krusial, mengingat kompleksitas cakupan yang harus diakomodasi di dalam tahap ini, terutama dari posisi para mantan kombatan. Secara konseptual, reintegrasi diartikan sebagai suatu proses yang memungkinkan komunitas untuk melakukan reformasi pasca konflik dan menerima mantan kombatan sebagai bagian utuh dari masyarakat. Tahapan panjang ini mensyaratkan lingkungan yang aman sebagai kondisi awal untuk mencapai kebutuhan sosial, ekonomi, politik dan psikologis untuk keberlanjutan perdamaian, kemakmuran, dan peningkatan kehidupan. (Mughah: 2009)

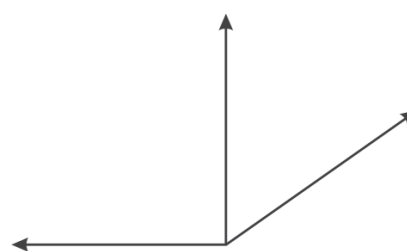
Selanjutnya, selain konsep reintegrasi, riset ini juga memakai teori gerakan sosial sebagai perspektif untuk menjelaskan basis-basis cara dan orientasi tujuan yang dilakukan LINA. Teori gerakan sosial akan menitikberatkan pada analisis penyebab atau latar konfliktual, pola protes serta bentuk gerakan LINA sebagai subjek atau aktor utama atas riset ini.

Teori gerakan sosial dijelaskan oleh Alberto Melucci (1996) sebagai suatu gerakan yang berbasis tiga kategori analisis, yakni gerakan yang membangun formasi aksi kolektif yang memerlukan solidaritas untuk memanifestasi konflik, kemudian bertujuan mengubah atau merombak sistem yang lama. (Melucci, 1996:28) Definisi tersebut akan digunakan dalam riset ini untuk melihat bagaimana LINA membangun solidaritas bersama untuk memanifestasi konflik atas ketidakadilan yang diterima kaum perempuan eks-kombatan. Kemudian seluruh program kerja dan aksi LINA bersama basis kekuatan sosialnya tersebut menjadi indikator upayanya merubah sistem

ketidakadilan tersebut.

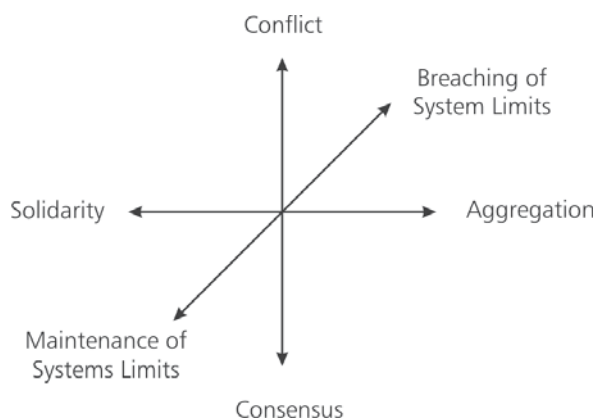
Berdasarkan definisi teorisasi gerakan sosial di atas, maka basis eksplanasi penting dalam melihat ini adalah dengan mengetahui ruang lingkup teori aksi kolektif. Melucci membangun teori aksi kolektif melalui desain sebagai berikut:

Gambar 1.1: Desain Teori Aksi Kolektif



Social Movements

Gambar 1.2: Desain Kategori Gerakan Sosial



Gambar 1.1 memperlihatkan ragam unsur yang ada di dalam aksi kolektif. Berdasarkan teori aksi kolektif tersebut, Melucci mengategorikan teori gerakan sosial pada gambar 1.2. Esensi utama teori gerakan sosial terdapat pada tiga hal, yakni (i) konflik (*conflict*), (ii) solidaritas (*solidarity*), dan (iii) merombak limitasi sistem (*breaching of systems limits*). (Melucci, 1996: 30)

Melucci menjelaskan bahwa “*conflict*” adalah “suatu perlawanan dua (atau lebih) aktor yang mencari kontrol atas sumber daya sosial berharga kepada setiap pelaku utama”. (Melucci, 1996: 24), sedangkan “*breaching of systems limits*” merupakan upaya mengubah sistem yang telah ada sebelumnya yang dirasakan tidak

adil. Melucci menekankan adanya aspek batasan kecocokan (*the limits of compatibility*) guna mengukur tingkat kesesuaian untuk mengatur suatu struktur, dengan “orientasi tujuannya yaitu merombak sampai pada batas mendasar sejauh mana suatu sistem masih bisa ditoleransi tanpa merubah strukturnya”. (Melucci, 1996: 24) Adapun unsur “*solidarity*” dimaknai sebagai “kemampuan para aktor untuk menerima/mengakui orang lain sebagai kesatuan kebersamaan bagi unit sosial yang sama”. (Melucci, 1996: 23)

Sedangkan Ferree dan Mueller (2004) memaknai gerakan perempuan sebagai suatu mobilisasi yang berbasis pada tuntutan perempuan sebagai suatu konstituensi dan strategi organisasional. Tujuan gerakan perempuan antara lain yakni “membawa perempuan pada aktivitas politik, memberdayakan perempuan terhadap tantangan batasan-batasan dalam aturan kehidupan, dan membentuk jaringan antar-perempuan untuk meningkatkan kemampuannya dalam pengakuan relasi gender sebagai sesuatu yang menindas dan harus segera dilakukan perubahan”. (Soule, 2004: 557)

Dalam gerakan sosial penting adanya aspek proses mobilisasi sumber daya. Tanpa sumber daya yang memadai, suatu gerakan sosial akan sulit dalam melancarkan aksi-aksi mereka agar mampu mencapai kepentingan bersama. Melucci meneruskan apa yang Etzioni (1968) pahami bahwa mobilisasi adalah “suatu proses yang mana diasumsikan oleh sebuah unit sosial, dengan relatif cepat, mengontrol sumberdaya yang belum pernah dikontrol sebelumnya”. (Soule, 2004: 289)

Selain itu aspek kekuatan solidaritas bersama juga menjadi salah satu faktor penting bagi gerakan sosial agak mampu bergerak maju mencapai tujuan-tujuannya. Alberto Melucci (1996) dan David A. Snow (2004) mengulas bagaimana solidaritas bersama dibangun dalam suatu gerakan sosial melalui proses “*framing*”. Fase ini dibutuhkan untuk menyamakan basis opini dan penyeragaman tujuan bersama dalam tubuh gerakan sosial.

Melucci menyimpulkan bahwa solidaritas internal dapat terbentuk selama konflik terjadi, sehingga akan

menghasilkan suatu identitas bersama. Hal yang terpenting selain perjuangan mendapatkan tujuan adalah penguatan solidaritas kelompok. Ia berpendapat bahwa “orang-orang akan merasa terikat satu sama lain bukan serta merta karena mereka saling berbagi kepentingan dan tujuan yang sama, tetapi melainkan juga karena mereka perlu ikatan tersebut untuk membuat kesepakatan tentang apa yang mereka lakukan”. (Melucci, 1996: 74) Solidaritas menurut Melucci bersifat kultural dan merupakan produksi simbolis kehidupan sehari-hari. (Melucci, 1996: 115)

HASIL DAN PEMBAHASAN

KINERJA LINA

Sebagai gerakan perempuan yang lahir pasca konflik, LINA telah melakukan berbagai kegiatan dan program kerja terutama dalam rangka mendorong proses reintegrasi perempuan eks-kombatan kembali ke tengah-tengah kehidupan masyarakat sipil. Pada dasarnya, dalam menjalankan berbagai program tersebut, LINA lebih cenderung mengutamakan program yang bersifat edukasional, ketimbang aktivitas pemberdayaan yang bersifat pemberian bantuan ekonomis seperti yang kebanyakan dilakukan berbagai organisasi perempuan yang lain.

Seperti yang ditekankan oleh Shadia Marhaban selaku presiden LINA, bahwa niat awal mendirikan LINA bukanlah sebagai lembaga permanen, melainkan justru sebagai *ad hoc bodies* atau lembaga yang bersifat sementara dan dibentuk pada saat dibutuhkan. Artinya, LINA hadir sebagai gerakan perempuan yang merespon kondisi faktual tentang kehidupan kaum perempuan eks-kombatan yang belum mendapatkan ruang beruntung dan posisi sosial pasca konflik. Diikuti pula dengan realita kehidupan perempuan Aceh pada umumnya yang masih terjerat dalam ketimpangan struktur sosial atas dominasi budaya patriarki.

Shadia Marhaban selaku Presiden LINA mengatakan tentang tujuan didirikannya LINA sebagai suatu gerakan perempuan pasca konflik.

“*Secara normatif LINA bertujuan untuk membantu*

perempuan Inong Bale agar mendapatkan legitimasi, pengakuan dan harga diri perempuan itu sendiri. Sehingga pada saat mereka telah memiliki LINA merasa seperti menemukan jati diri mereka kembali”

Dari keseluruhan program-program di atas, penelitian ini akan memfokuskan pembahasan pada tiga program utama LINA, yakni *training pendidikan demokrasi, partisipasi politik dan peningkatan kapasitas perempuan; pendidikan anak usia dini; dan media informasi*. Pemilihan terhadap ketiga program tersebut didasari atas beberapa pertimbangan analisis, bahwasanya ketiganya yang memiliki karakter efek dan manfaat program yang jangka panjang. Spirit menanamkan cikal bakal menjadi hal penting bagi LINA, sehingga program-program tersebut berkelanjutan dalam meningkatkan harkat martabat perempuan melalui kapasitas yang terbentuk dari perempuan itu sendiri Pendidikan partisipasi politik misalnya, telah menjadi bekal bagi kaum perempuan untuk mampu menduduki peran-peran tertentu dalam ranah publik dan taman kanak-kanak Moder (TKM) LINA adalah bentuk lembaga pendidikan besutan LINA yang masih berjaya hingga saat ini.

Secara spesifik, pendidikan partisipasi politik bagi perempuan eks-kombatan memiliki tiga tujuan utama yaitu: untuk mendukung perempuan eks-kombatan dan juga komunitas mereka tentang demokrasi dan politik; menciptakan jaringan perempuan aktif politik di seluruh Aceh; dan melatih perempuan agar mampu memiliki kapasitas dan mampu berdaya saing untuk mendapatkan pekerjaan pasca konflik. (LINA: 2010) Manfaat program LINA dalam hal pendidikan partisipasi politik juga diakui oleh salah seorang perempuan eks-kombatan, IW dari Calang, Aceh Timur yang aktif mengikuti program-program LINA. Dalam kesempatan wawancara langsung, ia menuturkan:

“Dengan mengikuti program LINA ini, kakak merasa menemukan tempat untuk berbagi. Training yang diberikan LINA mampu membangkitkan rasa percaya diri kakak, sehingga berani tampil bersuara dan paham tentang pendidikan demokrasi”

Secara garis besar penulis melihat materi yang diberikan LINA dalam training partisipasi politik dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama yakni: *pengetahuan praktis* dan *pengetahuan non-praktis*. Materi tentang pengetahuan praktis berisikan informasi dan sosialisasi tentang *blue print* perdamaian Aceh yang selalu dijadikan rujukan, kemudian ditambahkan pula tentang pengetahuan tentang alternatif pilihan moda yang bisa digunakan sebagai kendaraan politik kaum perempuan. Sedangkan pengetahuan non-praktis lebih bersifat materi-materi dasar yang mengandung makna dan nilai-nilai untuk membangkitkan spirit serta optimisme peran kepemimpinan perempuan.

Kerja penting lain yang dibangun LINA adalah menumbuhkan cikal bakal lahirnya pendidikan bagi anak-anak sejak usia dini. Dari berbagai biro LINA di tingkat kabupaten, LINA menginisiasi dibentuknya sekolah Taman Kanak-kanak (TK). Pada awalnya, sekolah-sekolah ini diperuntukan bagi anak-anak korban konflik, seperti anak-anak janda GAM dan juga korban bencana tsunami. TK ini sekaligus dijadikan media pemberdayaan perempuan, karena keterkaitan erat hubungan anak-anak dengan ibunya. Ide awal dibentuknya TK ini disampaikan oleh Shadia Marhaban bahwasannya:

“Ide untuk membuat sekolah ini adalah ketika banyaknya anak-anak korban konflik berusia TK yang belum mendapatkan pendidikan. Pada umumnya anak-anak ini pasti bersekolah diantar oleh ibu-ibunya yang juga korban konflik dan perempuan mantan kombatan. Nah, TK ini selain memberikan pendidikan bagi anak-anak, penting juga untuk menjadi wadah sosialisasi bagi perempuan eks-kombatan yang bisa mendorong proses reintegrasinya”

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Aceh telah membelenggu banyak hak-hak kehidupan sosial masyarakat, termasuk kebutuhan akses informasi. Status Aceh sebagai *war zone* atau zona perang, benar-benar membuat daerah ini terisolir dari dunia luar. Semua akses baik transportasi dan informasi dipersulit dan mendapat penjagaan ekstra ketat dari aparat militer. Kondisi inilah yang membuat generasi Aceh

pada masa konflik mengalami kemunduran dan keterbelakangan wawasan dan informasi.

Realita inilah yang turut menginisiasi LINA untuk menyediakan media informasi bagi masyarakat, yaitu melalui penerbitan media cetak Buletin Inong Aceh dan membuat radio komunitas Radio Liga Inong Aceh (RALINA FM). Kedua media informasi ini dibuat di Bireuen, di mana kegiatan dan antusiasme respons masyarakat terhadap keberadaan LINA paling tinggi dibandingkan kabupaten lain.

BENTUK IKATAN SOLIDARITAS BERSAMA DALAM LINA

Sejak awal didirikan pada tahun 2006, LINA tidak lantas semerta-merta menjadi suatu gerakan perempuan yang memiliki basis kekuatan sosial solid di Aceh. Sebagai gerakan sosial, LINA memerlukan basis kekuatan massa untuk menjalankan semua aksi gerakannya. Meskipun gerakan ini mengatasnamakan kalangan perempuan eks-kombatan sebagai kelompok yang menjadi fokus utama kerja mereka, tetapi LINA tetap membutuhkan proses untuk merangkul simpati dari perempuan Aceh pada umumnya dan masyarakat secara keseluruhan.

Analisis mengenai musuh bersama di dalam LINA akan dijelaskan pada bab ini melalui tiga sudut pandang utama yakni: siapa musuh bersama bagi LINA; apa persoalan atau masalah yang dihadapinya; dan bagaimana solusi yang ditawarkan dan dikerjakan LINA untuk mengatasi masalah tersebut. Ketiga analisis utama tersebut akan menggambarkan bagaimana konseptualisasi *common enemy* dikonstruksikan oleh LINA kepada basis kekuatan sosialnya. Dengan demikian, akan terlihat bagaimana kiprah LINA sebagai gerakan perempuan pasca konflik dan seberapa kuat ikatan solidaritas bersama yang ada didalamnya.

MUSUH BERSAMA: KETIDAKADILAN ELIT PEMERINTAH DALAM PROGRAM PERDAMAIAN DAN DOMINASI PATRIARKI

Duet antara dua kekuatan representatif negara (pemerintah pusat dan daerah) dalam program perdamaian di Aceh telah menunjukkan ketidakadilan

bagi kalangan perempuan eks-kombatan. Baik secara tertulis maupun praktik, tahapan reintegrasi dan kehidupan perempuan eks-kombatan pasca konflik belum terjamin oleh produk kebijakan elit pemerintah. Dari 3000 jumlah eks-kombatan (BRA 2005-2007) yang menerima dana kompensasi tidak menunjukkan keberadaan perempuan eks-kombatan menjadi bagian di dalamnya.

Negara yang berkewajiban melakukan pendistribusian kesejahteraan dari program perdamaian Aceh secara adil hingga menjangkau kalangan perempuan eks-kombatan, nyatanya justru lalai dan belum menyediakan kebutuhan hidup perempuan eks-kombatan pasca perang berakhir (mayoritas responden yang ditemui penulis mengaku belum menerima uang kompensasi). Seperti pesan yang telah dicakup dalam konsep reintegrasi, bahwasanya kebutuhan hidup masyarakat pasca konflik yang dimaksud bukan hanya sekedar kebutuhan ekonomi saja, melainkan sosial dan politik juga.

Selain konteks ketidakadilan program perdamaian oleh kekuasaan elit pemerintah, LINA mempercayai juga subjek lain yang merugikan keberadaan kaum perempuan di Aceh adalah masih kuat dan mendominasinya budaya patriarki. Di Indonesia, patriarki sering kali disebut sebagai suatu konseptual yang menunjukkan adanya budaya dan pola relasi sosial yang mengedepankan laki-laki ketimbang perempuan, mengutamakan garis keturunan ayah dibanding ibu, dan meninggikan derajat laki-laki ketimbang perempuan. Secara teoritis, Silvia Walby (1990) menarik kesimpulan tentang definisi patriarki sebagai “sebuah sistem struktur sosial dan praktik-praktik di mana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksplotasi perempuan”. (Walby: 2014, 28) Menurut Walby, sistem relasi sosial menjadi perwujudan paling abstrak atas patriarki, sedangkan untuk menelaah praktik patriarki, Walby membaginya ke dalam enam struktur, yakni: “mode produksi patriarki, relasi patriarki pada pekerjaan dengan upah, relasi patriarki dalam negara, kekerasan laki-laki, relasi patriarki dalam seksualitas, dan relasi patriarki dalam

budaya". (Walby: 2014, 28-29)

Ketimpangan relasi gender dalam arus dominasi patriarki inilah yang menjadi sebuah objek bagi LINA dalam rangka mengkonstruksikan pemahaman subjektifitas "lawan" dalam gerakannya. Dalam program-program kerjanya, LINA secara konsisten menampilkan realita-realita dominasi patriarki di Aceh yang terus menghimpit ruang gerak perempuan, struktur sosial inilah yang semestinya dirombak agar perempuan kembali pada posisi kesetaraannya. Dari ketiga program kerja utama LINA baik pada program training pendidikan demokrasi, partisipasi politik dan peningkatan kapasitas, media komunikasi maupun pendidikan anak usia dini, desain materi dan program LINA selalu memuat nilai-nilai kesetaraan gender dan melawan dominasi patriarki.

Atas kelalaian pemerintah (negara) dalam memproduksi kebijakan perdamaian yang masih diskriminatif terhadap perempuan eks-kombatan dan masih kuatnya dominasi patriarki inilah, membuat keduanya menjadi suatu subjek yang diposisikan LINA sebagai *common enemy* dalam gerakannya. Berdasarkan kumpulan wawancara bersama para aktivis, kader dan pengurus LINA, maka berikut ini adalah poin-poin penting yang digolongkan LINA sebagai wujud ketidakadilan yang dimasukkan ke dalam "pembingkaian" isu yang senantiasa disuarakan LINA, yaitu:

- Perempuan eks-kombatan merupakan bagian penting dari proses panjang pencapaian perdamaian di Aceh.
- Realita masih termarginalkannya perempuan eks-kombatan pasca konflik, merupakan wujud ketidakadilan yang harus dirombak.
- Proses reintegrasi yang tercantum pada MoU yang sejatinya harus mendalam dan menyeluruh, nyatanya belum mengakomodasi kepentingan perempuan eks-kombatan dan perempuan Aceh pada umumnya.
- Mengingat setiap pengalaman konflik kaum perempuan itu unik dan berbeda, maka diperlukan kebijakan yang ramah gender untuk mengakomodasi kepentingan perempuan secara adil.

- Perempuan Aceh menjadi entitas penting yang memiliki hak dalam setiap pembuatan keputusan publik. Sehingga kebutuhan perempuan tidak hanya berkuat pada persoalan ekonomi (kesejahteraan) semata, melainkan kebutuhan hak sosial dan politik yang berkelanjutan.

Setelah tahapan mempertegas "persoalan bersama" yang dihadapi dalam tubuh gerakan kepada basis sosialnya, LINA mulai menunjukkan berbagai alternatif solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Analisa penulis membagi cara LINA dalam menangani "persoalan bersama"nya tersebut ke dalam dua jenis cara yaitu; *penguatan internal* yakni pembangunan kapasitas dan peningkatan peran perempuan dalam ranah politik; dan *kerja sama eksternal* yakni LINA membuka ruang untuk menjalin hubungan dengan lembaga perwakilan negara serta mengkomunikasikan kebutuhan spesial perempuan eks-kombatan pasca konflik.

Solusi selanjutnya yang diupayakan LINA untuk menyelesaikan "persoalan bersama" adalah melalui kerja sama dengan pihak eksternal. Pihak eksternal yang dimaksud adalah diluar komunitas perempuan eks-kombatan dan seluruh kader kekuatan sosial LINA. Oleh karena itu LINA mulai membuka ruang untuk menghadirkan perwakilan negara agar melihat persoalan kehidupan perempuan eks-kombatan pasca konflik, dalam hal ini LINA menggandeng BRA sebagai wujud lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap proses reintegrasi damai Aceh. Hasil kerja sama tersebut dapat dilihat ketika BRA dalam masa kepemimpinan Nur Djuli yang mulai mereformasi program reintegrasi dan diarahkan kepada kebijakan program ramah gender

MOBILISASI SUMBER DAYA LINA NON-DANA: MOBILISASI ORGANISASIONAL & MOBILISASI AKTIVIS

Sebagai gerakan sosial, LINA memanfaatkan fungsi organisasi sebagai suatu struktur jaringan yang dibangun dengan cara mendirikan organisasi-organisasi cabang di setiap daerah. Organisasi cabang inilah yang selanjutnya disebut sebagai biro. LINA biro daerah menjadi tangan-tangan penggerak LINA yang secara

aktif saling membentuk jaringan kolaborasi dengan pola keorganisasian yang serupa.

Biro daerah dalam stuktur organisasi LINA inilah yang difungsikan sebagai pelaksana program LINA pusat secara *top down*, artinya ada semacam instruksional dari LINA pusat ke biro daerah. Dengan demikian, akan memudahkannya dalam mengerjakan agenda-agendanya secara tersebar. Akan tetapi LINA tidak lantas menerapkan hubungan *top down* yang kaku, karena LINA memberikan keleluasaan bagi setiap biro daerah dalam program kerjanya. Tentu saja, keleluasaan yang dimaksud masih berdasarkan satu arus kesamaan visi dan misi LINA secara kesatuan.

Kalangan aktivis merupakan bentuk sumber daya manusia yang menjadi suatu sumber daya krusial sekaligus potensial untuk mendorong kinerja dan tujuan-tujuan gerakan LINA. Di dalam tubuh LINA, terdapat aktor-aktor utama yang menjadi *think-thank* dalam berbagai kiprah dan kinerja LINA. Dalam hal ini, sosok Shadia Marhaban memang menjadi tokoh utama yang tidak bisa terpisahkan dari tubuh LINA. Selain sebagai salah satu pendiri dan inisiator LINA, beliau juga merupakan aktor kunci dalam perjalanan LINA. Porsi pengaruh yang dimilikinya cukup besar mendominasi LINA, sehingga banyak keputusan-keputusan penting dalam LINA diambil berdasarkan pertimbangan Shadia Marhaban. Meskipun dalam perjalanannya, dominasi Shadia ini turut membawa kontroversi dalam tubuh internal LINA seperti yang telah dibahas pada bab III, tetapi tidak dapat dimungkiri bahwa pencapaian-pencapaian besar di dalam LINA tidak lepas dari campur tangannya.

STRUKTUR MOBILISASI SUMBER DAYA DANA LINA

Untuk menjalankan teknik memobilisasi dana, LINA melakukan mobilisir terhadap semua jenis *funding* yang ia miliki. Artinya, LINA tidak terlalu ketat dalam penyeleksian *funding* seperti apa yang akan bekerja sama dengannya. Dalam hal ini, *funding* merupakan sumber daya dana utama yang dimiliki LINA. Terlepas pada saat parkteknya sering pula menggunakan uang swadaya sumbangan dari para kader, tetapi presentase jumlahnya tidak signifikan.

Funding difungsikan oleh LINA sebagai sumber pendanaan terhadap hampir seluruh program kerja LINA.

Gambar 1.3: Skema Sumber Mobilisasi Dana LINA



Gambar 1.4: Skema Sumber Mobilisasi Kegiatan Pendidikan dan Training LINA



KESIMPULAN

Perempuan eks-kombatan merupakan aktor yang telah berperan ganda pada masa konflik, mereka menjadi sayap kekuatan Gerakan Aceh Merdeka baik secara militer maupun non-militer, namun juga sekaligus menjadi korban atas konflik itu sendiri. Ketika konflik berakhir melalui kesepakatan perdamaian (MoU Helsinki), perempuan eks-kombatan menjadi pihak yang terlupakan dalam konteks manfaat program perdamaian Aceh, khususnya pada program reintegrasi.

Marginalisasi dan ketidakadilan manfaat reintegrasi pada kelompok perempuan eks-kombatan telah menginisiasi lahirnya gerakan perempuan LINA sebagai suatu wadah yang memperjuangkan hak-hak mereka. Peran LINA secara langsung dalam rangka mendorong

proses reintegrasi perempuan eks-kombatan dapat dilihat melalui program-programnya. *Pertama*, ketiga program utama LINA merupakan pilihan program yang menekankan sifat edukasional yang telah menjadi sebuah proses penanaman cikal bakal pada masa basis sosialnya sebagai pembekalan kekuatan dan kemandirian perempuan. *Kedua*, strategi program LINA dengan orientasi tujuan efek manfaat jangka panjang melalui program training demokrasi dan partisipasi politik mampu membangkitkan semangat antusiasme kepemimpinan perempuan, baik pada sektor domestik maupun sektor publik. Pengetahuan demokrasi dan kesadaran atas pentingnya politik yang diajarkan LINA kepada kadernya banyak mengantarkan perempuan Aceh berani maju sebagai calon-calon legislatif dalam perpolitikan praktis Aceh, meskipun masih banyak menemui berbagai tantangan dalam mencapainya. *Ketiga*, mobilisasi sumber daya dana dan non-dana yang dilakukan LINA telah mendorong kebijakan reintegrasi ramah gender, meskipun aplikasi di lapangan tidak berlangsung maksimal atas akibat pergantian elit penguasa. *Keempat*, seluruh program kerja LINA berhasil menciptakan komunikasi dan interaksi antara kelompok perempuan eks-kombatan dan non-kombatan, sehingga relasi sosial mereka kembali terbentuk dan mewujudkan reintegrasi yang bermartabat di tengah masyarakat.

Pilihan LINA yang fokus pada bidang edukasional dan menekankan unsur politik secara langsung membawa resiko terhadap eksistensi gerakannya. Dinamika perpolitikan Aceh yang fluktuatif telah menjerat keorganisasian LINA dalam ruang yang tersudutkan, sebagai dampak atas pilihan afiliasi politik para elit LINA. Ketokohan aktor elit dalam gerakan sosial memang sangat menentukan, demikian halnya pada LINA, ketokohan Shadia Marhaban dicitrakan mewakili identitas LINA. Dominasi Shadia dan perbedaan pilihan afiliasi politik telah melahirkan friksi yang tajam pada level elit LINA. Kondisi ini berimplikasi pada kekokohan pondasi gerakan dan regenerasi pemimpin gerakan. Ironisnya, ketika pilihan afiliasi politik Shadia mengalami kekalahan, ruang gerak LINA ikut terkucilkan, bahkan dapat dikatakan

sengaja dibunuh oleh elit pemenang yang berkuasa. Sehingga tidak heran, jika saat ini banyak beberapa orang yang sentimen ketika mendengar sebutan kata “LINA”, inilah hasil dari friksi tersebut.

Menyikapi fenomena gerakan perempuan di Aceh, penelitian ini memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan bahan diskusi dan penelitian lebih lanjut. *Pertama*, meskipun tidak mudah, gerakan perempuan di Aceh harus menciptakan suatu konsolidasi yang kuat antar gerakan, spirit konsolidasi *Duet Pakat Inong Aceh I* dapat dijadikan kilas balik yang cukup efektif. *Kedua*, wakil-wakil pemimpin perempuan di daerah hendaknya selalu mendorong diterapkannya kebijakan ramah gender, supaya keseimbangan antara hubungan relasional kaum laki-laki dan perempuan lebih seimbang dan *special needs* kaum perempuan dapat terakomodasi dengan baik. *Ketiga*, pendidikan merupakan media yang efektif untuk memutus mata rantai konflik dengan mengajarkan nilai-nilai cinta damai, diharapkan strategi ini dapat diperkuat di Aceh sebagai wilayah pasca konflik. Pemerintah seyogyanya meningkatkan dukungannya pada lembaga-lembaga pendidikan secara menyeluruh tanpa diskriminasi perlakuan, seperti halnya terhadap TKM LINA.

BIBLIOGRAFI

BUKU

- Anderlini, Sanam Naraghi. *Women Building Peace: What They Do, Why It Matters*. London: Lynne Rienner Publisher. 2007
- Avonius, Leena. *Reintegration: BRA's Roles in The Past and its Future Visions*. Aceh: Crisis Management Initiative. 2011
- Ball, Nicole dan Goor, Luc van de. *Disarmament, Demobilization and Reintegration: Mapping Issues, Dilemmas, and Guiding Principles*. Netherland Institute of International Relations. The Hague: Clingendael. 2006.
- Basyar, M. Hamdan. Dkk. *Aceh Baru; Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi*. P2P LIPI. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Bhakti, Ikrar Nusa. *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*. Jakarta: P2P-LIPI. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Buchanan, Cate. *Reflection on Guns, Fighters, and Armed Violence in Peace Processes: Negotiating Disarmament*. Viewpoints Vol. 1. Switzerland: Center for Humanitarian Dialogue. 2008
- Daroeso, Bambang. *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Surabaya: Aneka Ilmu. 1986
- Davies, Matthew N. *Indonesia's War over Aceh: Last Stand on Mecca Porch*. New York: Routledge. 2006.
- Dudouet, Véronique, et.al. *Post-War Security Transitions: Participatory Peacebuilding after Asymmetric Conflict*. Oxon: Routledge. 2012

- Frødin, Lina. *The Challenges of Reintegration in Aceh dalam Reconfiguring Politics: The Indonesia- Aceh Peace Process*. London: Conciliation Resources. 2008
- Galtung, Johan. *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*. Surabaya: Pustaka Eureka. 2003
- Hadiwinata, Bob Sugeng, dkk. *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka: Dari Kotak Peluru ke Kotak Suara*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung. 2010
- James, Valentine Udoh. *Capacity Building in Developing Countries*. USA: Praeger Publishers. 1998
- Morfit, Michael. *Beyond Helsinki: Aceh and Indonesia's Democratic Development*. National University of Singapore. Singapore: Asia Research Institute. 2007
- Mugah, Robert. *Security and Post-Conflict Reconstruction*. New York: Routledge. 2009.
- Mujiburrahman & Nurdin, Abidin. *Penguatan Kapasitas Perempuan Aceh Dalam Proses Rekonstruksi dan Reintegrasi*. Aceh: United Nation Development Programme. 2008
- Melucci, Alberto. *Challenging Codes: Collective Action in the Information Age*. Melbourne: Cambridge University Press. 1996
- Nilson, Anders. *Reintegrating Ex-Combatants in Post-Conflict Societies*. Stockholm: SIDA. 2005
- Oliviera, Jose Luis de, dkk. *Meningkat yang Tercinta: Mengubah Kenangan Pahit Masa Lalu Menjadi Muara Kekuatan Masa Kini*. Jakarta: Asia Justice and Rights. 2014
- Rahmatillah, Syarifah, dkk. *Gerakan Perempuan Aceh Mengawal Perdamaian*. Aceh: The Asia Foundation. 2011
- Rufer, Reto. *Disarmament, Demobilisation and Reintegration (DDR): Conceptual approaches, specific settings, practical experiences*. Geneva: DCAF. 2005
- Saiful, Mahdi, dkk. *Perempuan dan Proses Perdamaian di Aceh*. The Aceh Institute. 2009
- Sharpe, Joan & Wall, Imogen. *Media Mapping: Understanding Communication Environments in Aceh*. The World Bank. 2007
- Snow, David A. & Soule, Sarah A. & Kriesi, Hanspeter. *The Blackwell Companion to Social Movements*. USA: Blackwell Publishing. 2004
- Srimulyani, Eka & Inayatillah. *Perempuan Dalam Masyarakat Aceh: Memahami beberapa Persoalan Kekinian*. Aceh: Bandar Publishing. 2009
- Sofyan, Andriyana. *Perempuan Aceh Bicara*. Bangkok: United Nation Development Fund for Women. 2008
- Suleeman, Evelyn. *Inong Aceh di Tanah Nusantara*. Jakarta: PT. Intan Hitawarsana Sejahtera. 2009
- Törnquist, Olle, dkk. *Aceh: Peran Demokrasi Bagi Perdamaian dan Rekonstruksi*. Yogyakarta: PCD Press Indonesia. 2011
- United Nations Department of Peacekeeping Operations. *Disarmament, Demobilization and Reintegration of Ex-Combatants in a Peace-keeping Environment; Principles and guidelines*. USA: United Nation. 2000
- Zain, Fajran. Dkk. *Geunap Aceh: Perdamaian Bukan Tanda Tangan*. Banda Aceh: Aceh Institute Press. 2010
- Wandita, Galuh, dkk. *Merentang Juang: Suara Perempuan Pejuang Penyintas Kekerasan*. Jakarta: Asia Justice and Rights. 2014
- Selatan. Universitas Gadjah Mada. Hal 210-224. Volume 2, No.3. 2012
- Seumiké. Yusrizal. dkk. Kewenangan Pemerintah Aceh Berdasarkan UU 11/2006: Potensi Sengketa Hubungan Pusat Daerah. The Aceh Institute. Hal 1-34. Volume 3, No.1. 2007
- IIAS Newsletter. Elsa Clavé-Celik. Images of The Past and Realities of The Present: Aceh's Inong Balee. International Institute for Asian Studies. Hal 10-11. Volume 48 Summer. 2008

LAPORAN RESMI

- Badan Reintegrasi-Damai Aceh. *Following Up On The Helsinki Peace Framework: A Comprehensive Action Plan*. Edisi 2. 2009
- Crisis Management Initiative. *The Aceh Peace Process: Involvement of Women*. 2006
- Liga Inong Aceh. *The Condition and Position of The Acehnese Women in Post Conflict and Tsunami Era and Their Role in The Process of Reconstruction and Rehabilitation*. Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ). 2007
- Multi-Stakeholder Review of Post-Conflict Programming in Aceh. *Identifying the Foundations for Sustainable Peace and Development in Aceh*. 2009
- The World Bank. *GAM Reintegration Needs Assessment: Enhancing Peace through Community-level Development Programming*. 2006
- United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). *Women in Peace Building in Aceh*. 2008
- United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). *Women in the Political Life of Aceh*. 2008
- International Women Tribute's Centre. *Simplified Version of UNSCR 1325 on Women, Peace and Security*. 2000

MEDIA CETAK

- Buletin Inong Aceh. Edisi Februari 2009
- Serambi Indonesia. Edisi Khusus Peringatan 9 Tahun MoU Helsinki. 15 Agustus 2014
- Women's View Report. Search for Common Ground Indonesia. Edisi Mei 2012

MODUL

- Liga Inong Aceh. *Panduan Pendidikan Politik Untuk Perempuan*. Friedrich Ebert Stiftung. 2009

TESIS

- Lusia, Henny. *Mediasi yang Efektif dalam Konflik Internal Studi Kasus: Mediasi oleh Crisis Management Initiative dalam Proses Perdamaian Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Pasca Sarjana. Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Indonesia. 2010
- Sari, Tri Fitriani Puspita. *Peran Organisasi Sosial Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Aceh Pasca Perundingan Helsinki Tahun 2005 – 2011*. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Gadjah Mada. 2011
- Uning, Dara Meutia. *Female Ex-Combatants Reintegrations into Post-Conflict Aceh: Women at the periphery*. School of Philosophy, Anthropology, and Social Inquiry. Faculty of Arts. University of

JURNAL

- Multiversa. Titik Firawati. Proses Perdamaian di Aceh dan Thailand

Melbourne. 2008

Zaimar, Yulia Sofiani. *Konstruksi Identitas Perempuan Aceh dalam Majalah Inong Aceh*. Profram Studi Ilmu Susastra. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Universitas Indonesia. 2011

MEDIA ONLINE

Muda, Putroe. *Sepenggal Kisah Pasukan Inong Bale: Nyanyianku Menjadi Deritaku*. dalam <http://www.penapost.com/> diunggah 1 November 2013

Serambi Indonesia. *Kisah Sukses Reje Asnaini Menerapkan Hukum Adat*. dalam <http://aceh.tribunnews.com/> diunggah 16 Juni 2014

Shadia Marhaban. *A Sole Woman at the Negotiating Table for Peace*. Dalam <http://www.undp.org/> diunggah 14 Juli 2014